

## PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA SISOMA KECAMATAN TANTOM ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Oleh:

**Emirza Henderlan Harahap**

Dosen FISIPOL UGN Padangsidempuan

Email : [emhenhar@gmail.com](mailto:emhenhar@gmail.com)

### Abstraksi

*Penelitian ini beranjak dari observasi awal bahwa peran kepala desa dalam pengembangan masyarakat desa Sisoma Kecamatan Tantom Kabupaten Tapanuli Selatan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Kabupaten Tapanuli Selatan.*

*Dengan menerapkan metode pendekatan deskriptif dan kualitatif, informan diambil sebanyak 40 orang dari aparat desa dan anggota BPD, kemudian dilakukan wawancara mendalam dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif. Hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut: (1) Bahwa secara umum peran kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sisoma berjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal. (2) Masih adanya beberapa program / rencana pembangunan desa yang belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan kecukupan anggaran pembangunan yang masih rendah, serta kendala birokrasi, rentang kendali dan kondisi geografis perdesaan yang sulit dijangkau sehingga ADD dan Dana Otonomi Khusus mengalami keterlambatan.*

*Saran yang dapat diberikan antara lain: untuk mengoptimalkan peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa maka disarankan kepada pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan perlu mengalokasikan kompensasi berupa tunjangan kinerja bagi kepala desa berprestasi untuk setiap bulan; dan untuk menjamin terlaksananya semua rencana / program pembangunan desa, khususnya di desa Sisoma, maka dalam penyusunan dan pengadopsian program / rencana pembangunan desa perlu memperhatikan kemampuan keuangan program / berencana untuk membangun desa.*

*Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan Masyarakat Desa*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta kepentingan masyarakat.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-

menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Menurut kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dipertegas kembali dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa atau yang disebut dengan kata lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa dengan melalui pemerintah desa dapat diberi penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan urusan. Mariun (dalam Siswanto, 1988) menjelaskan perbedaan istilah pemerintah dan pemerintahan adalah bahwa "istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi; sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan organ atau alat perlengkapan yang menjalankan bidang tugas pekerjaan atau fungsi itu". Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa istilah pemerintahan menunjuk kepada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada subjek. Pemerintahan Desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan PP. 72 Tahun 2005, diatur sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa terdiri dari

- Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayaan.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang meraupkan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/ kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar tahun 19 Landasan pemikiran dalam pengaturan dalam mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sangat penting, karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut

berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijak-sanaan daerah maupun nasional untuk ke-butuhan pembangunan secara menyeluruh.

Dengan demikian kepala desa dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Desa merupakan dasar dari satuan pemerintah yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan Negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan. Dalam arti masyarakat ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga keluarganya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut. Bicara Soal Pembangunan Desa Saparin (1986) Pembangunan masyarakat desa merupakan pengkhususan dari pengertian *Community Development* yang berarti pembangunan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tujuan untuk menaikkan penghasilan serta taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

## 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan terdapat beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi yakni antara lain:

1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Hambatan apa yang di temui oleh kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

## 3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di temui oleh kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

## 4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Tempat Penelitian  
Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi kepala desa Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam merumuskan kebijaksanaan tentang pembangunan masyarakat desa di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bagi Akademisi  
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya dibidang Ilmu Pemerintahan.
3. Bagi Peneliti  
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana program studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan.

## 5. Kerangka Pemikiran

Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai

ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Seperti kutipan dari definisi Peran merupakan perilaku yang di tuntut untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. Sehingga seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau kepala desa harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari warga desa dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang kepala desa selaku pemimpin tertinggi di desa dalam roda kepemimpinannya.

Kepemimpinan seorang kepala desa dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian

seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Disamping itu kita perlu memahami dan mengetahui seni-seni dalam memimpin itu sendiri sehingga kita bisa paham dan mengerti model dalam kepemimpinan seseorang dalam memimpin orang atau kelompok yang dipimpinnya. Karena dalam proses kepemimpinan tidak terlepas dari gaya kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau orang yang mendapat pengaruh tersebut. Jadi kepemimpinan kepala desa juga harus mampu memiliki ciri khas memimpin sesuai kondisi ruang dalam pola kehidupan serta kultur yang berlaku didaerah kepemimpinannya.

Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik, oleh karena itu setiap tempat yang dihuni makhluk hidup dan terkhususnya manusia menginginkan suatu perubahan dari yang kurang menuju yang lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. Pembangunan yang bermakna adalah saat seseorang atau sebuah kelompok dapat merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan pemecahan masalahnya sendiri. Persis perumpamaan kuno: seseorang yang disedekahi sekeranjang ikan bakal kenyang selama satu dua hari; jika ia mendapat kail maka kenyanglah dia seumur hidupnya malah bisa juga menjadi pengeksport cakalang. (pembebasan dan pembangunan, 1997 : hal 04).

Dalam era sekarang ini kata pembangunan bukan merupakan sesuatu yang asing lagi untuk di dengar, namun kata pembangunan itu terkadang hanya dijadikan money politik saja atau sebuah janji-janji manis yang hanya dilontarkan oleh seorang yang hanya menjeri kesempatan dalam menggapai masa.

Sehingga pembangunan yang kita harapkan adalah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang mana merupakan hasil representasi dari rakyat tapi kenyataannya rakyat lagi-lagi harus dikecewakan. Untuk itu dalam perkembangannya perlu dilakukan sesuatu bentuk susunan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat bersama wakilnya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan mereka bersama.

Oleh sebab itu dalam proses pembangunan di desa perlu diperhatikan tiga aspek pembangunan yang merupakan dimensi dari pembangunan di mana adanya Pembangunan ekonomi, Pembangunan politik, dan Pembangunan sosial. Oleh sebab itu di desa pun harus memperhatikan tiga dimensi pembangunan ini, agar dalam perkembangannya selalu stabil dan menjadi tolak ukur dari pembangunan itu sendiri.

Sangatlah jelas bahwa dari ketiga dimensi pembangunan yang harus dilakukan di desa, maka harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah desa dan yang terlebih khususnya kepala desa sebagai pimpinan yang sangat kuat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan di desa.

Tidak terlepas dari itu yang harus diperhatikan adalah peran serta aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses maupun awal perencanaan itu dibuat. Sehingga dalam perkembangannya akan menjadi baik sesuai yang diinginkan, seperti perumpamaan kuno tadi bahwa masyarakat harus memiliki kail sendiri sehingga ia mampu bertahan hidup dan mampu memecahkan masalahnya sendiri serta bisa menghasilkan lebih bagi Desanya. Tak lepas dari itu adapun defenisin, menurut Cambridge, England pada Tahun 1948, P.M.D (pembangunan masyarakat Desa, 1983: hal 17) suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif

masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan response yang antusias terjamin.

Dengan kata lain secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan akan berjalan dimana adanya kerja sama antara masyarakat dalam pemerintah desa dalam merumuskan, menetapkan dalam melakukan proses dari pembangunan itu serta adanya kontrol dan pengawasan yang aktif dari keduanya.

Karena Desa adalah bentuk dari suatu negara yang kecil maka perlu menjadi perhatian khusus akan desa itu sendiri. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 maka disini sangat jelas desa sangat di perhatikan baik secara asal-usulnya, anggaran maupun proses berkembangannya desa itu kearah yang lebih baik, yangmana desa makmur maka Negara pun akan mendapat dampaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan kepala desa jika terjadi suatu pembangunan di desa yang berdampak pada masyarakat serta lingku-ngannya desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

## 6. Metode Penelitian

Metode penelitian cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kinerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang bersangkutan". ( Komaruddin, 2001 : 11)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu berdasarkan data dan informasi yang digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara objektif. Dengan kata lain penelitian yang menggambarkan masalah yang diselidiki secara faktual dan langsung apa adanya dengan maksud agar dapat gambaran yang jelas (Sugiono,2010:8)

Dalam penelitian skripsi ini penulis memilih metode kuantitatif melalui berbagai cara yakni :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan buku-buku, brosur-brosur serta artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahannya.
2. Metode Penelitian Lapangan (Field research) yaitu penelitian secara langsung ke objek penelitian yaitu Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai tanggung jawab yang luas. Tanggung jawab meliputi urusan tugas pekerjaan yang terpisah dan terbagi kepada pejabat instansi pemerintah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, sedangkan di desa tanggung jawab urusan tugas pelayanan itu terpusat pada Kepala Desa. Tanggung jawab urusan tugas pekerjaan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa atau melalui orang lain.

“Menurut Widjaja (2008:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya”.

Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

#### Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :

- a). Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui bupati dan tembusan camat.
- b). Membina kehidupan masyarakat desa.
- c). Membina perekonomian desa.
- d). Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e). Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, di bantu oleh lembaga adat desa
- f). Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- g). Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa.
- h). Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala desa mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Menurut Widjaja (2008:28) "Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa".

## 2. Pembangunan Masyarakat Desa Pembangunan

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli .

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh

system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. (Sukirno, 1995 : 13).

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/ perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

### Masyarakat Desa

Masyarakat dan pedesaan atau desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Misalnya, Masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain (Hassan Shadily, 1993:47). Masyarakat dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 2002:144).

Dari pemaparan diatas sudah di jelaskan bahwasanya masyarakat

pedesaan adalah dua kata yang terpisah atau mempunyai arti tersendiri, untuk bisa mendapatkan pengertian dari dua kata tersebut maka harus diartikan terlebih dahulu dari kata perkata sehingga dari dua kata tersebut bisa di jadikan satu arti yang seperti di harapkan.

Paul H. Landis seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa di definisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian (Rahardjo, 1999:30).

Pandangan tentang kedua kata diatas yaitu masyarakat pedesaan atau desa dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan kepentingan mereka.

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya

bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Yang menjadi ciri masyarakat pedesaan antara lain; *pertama*, di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. *Kedua*, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar ke-keuargaan. *Ketiga*, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. *Keempat*, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi Rahardjo (1999:40) menambahkan bahwa sejumlah sosiolog dalam merumuskan karakteristik masyarakat cenderung mengacu pada pola-pola pikiran yang bersifat teoritik, seperti konsep dari Ferdinand Tonnies (1855-1936), Emile Durkheim (1858-1917) dan Charles Horton Cooley (1864-1929).

Menurut Ferdinand Tonnies (1855-1936) bahwa masyarakat adalah karya ciptaan manusia itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Tonnies dalam kata pembukaan bukunya. Masyarakat bukan organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis. Juga bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri, sedang mereka didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia. Melainkan masyarakat adalah usaha manusia untuk memelihara relasi-relasi timbal balik yang mantap.

Emile Durkheim (1859-1917), Profesor Sosiologi pertama dari

Universitas Paris, mengambil pendekatan kolektivitas terhadap pemahaman mengenai masyarakat yang melibatkan berbagai bentuk solidaritas. Solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial. Dalam hal ini dapat berupa, nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektif.

#### **Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat**

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan, yaitu pendidikan penyuluhan (*extension education*) dan pembangunan masyarakat (*community development*). Di tahun 1966 Joseph Di Franco membandingkan kedua macam pendekatan tersebut secara menyekuruh berdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsip-prinsipnya. Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya.

Hal tersebut disebabkan karena kedua pendekatan menginginkan perubahan perilaku dalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secara langsung berkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah) juga berkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat.

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. *Bryant dan White* (1987 : 132), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

- a). Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b). Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.

- c). Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d). Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati.

#### **Perencanaan Pembangunan Pespektif dan Tahunan**

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pembedanya dari segi jangka waktu rencana, yaitu : (Tjokroamidjojo, 1990)

1. Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
2. Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
3. Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Istilah perencanaan perspektif atau perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Pada hakikatnya, rencana perspektif adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Namun pada kenyataannya, tujuan dan sasaran luas

tersebut harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dengan membagi rencana perspektif itu kedalam beberapa rencana jangka pendek atau tahunan. (Arsyad, 1999 : 50). Pemecahan rencana perspektif menjadi rencana tahunan dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat lebih mudah untuk dievaluasi dan dapat diukur kinerjanya.

Tujuan pokok rencana perspektif dan tahunan ini adalah untuk meletakkan landasan bagi rencana jangka pendek, sehingga masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat dipertimbangkan dalam jangka pendek.

### 3. Peranan Kepala Desa dalam urusan Pembinaan Masyarakat Desa

Dari hasil observasi peneliti, diketahui bahwa di dalam urusan pembinaan masyarakat desa, kepala desa cukup berperan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa, terutama disektor ekonomi/pertanian tanaman pangan, sektor pendidikan, kesehatan dan adat-istiadat. Namun demikian ada ada informan yang memberikan catatan khusus, di mana pembangunan posyandu belum dapat diselesaikan sehingga kegiatan penimbangan Balita dilaksanakan di rumah Kepala Desa.

Sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan kemampuan administratif dibidang pembangunan, menurut Katsz (1969) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui dukungan sistem-sistem pendukung pembangunan. Sistem-sistem tersebut terdiri dari

- (1) Pelaksanaan Tugas (performance);
- (2) Struktur (structure); dan
- (3) Hubungan Dengan Lingkungan (*Environmental linkagers*).

Dengan kata lain, bahwa Kemampuan administratif adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas, didukung oleh struktur organisasi dan dukungan lingkungan (Ndraha, 1987).

Ketiga sistem pendukung kearah pencapaian tujuan pembangunan (desa) diatas saling terkait satu dengan lainnya dan memiliki fungsi serta peranan masing-masing. Dukungan Lingkungan memiliki fungsi yang paling mendasar sebagai pendukung atau penyangga utama berdirinya suatu sistem pemerintahan desa secara keseluruhan, sementara dukungan struktur merupakan kerangka bangunan yang berdiri tegak diatas landasan dukungan lingkungan, sedangkan Pelaksanaan Tugas (*performance*) adalah motor penggerak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Lemahnya ketiga sistem pendukung diatas berarti melemah pula kemampuan pemerintahan desa yang pada gilirannya akan menyeret sistem pemerintahan dan pembangunan desa secara keseluruhan sehingga menghambat pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa itu sendiri.

## BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Bahwa secara umum peranan kepala desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa di desa Sisoma berjalan cukup baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal.
2. Bahwa hambatan yang dihadapi oleh kepala desa masih terdapat beberapa program/rencana pembangunan desa yang belum

dapat terealisasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat kecukupan anggaran pembangunan yang masih rendah, serta hambatan birokrasi, rentang kendali dan kondisi geografis wilayah desa yang sulit terjangkau sehingga ADD sering mengalami keterlambatan pencairannya.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, maka disarankan agar pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan perlu menganggarkan dana kompensasi dalam bentuk tunjangan kinerja bagi Kepala Desa yang berprestasi untuk setiap bulan.
2. Untuk menjamin terealisasinya semua rencana/program pembangunan desa, khususnya di Desa Sisoma, maka disarankan agar dalam penyusunan dan penetapan program/rencana pembangunan desa perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dalam membiayai program/rencana pembangunan desa tersebut.

## D. Daftar Pustaka

### Buku:

- Hassan Shadily, 1993, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kaelan H. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta : Paradikma
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta

Meleong. Lexi, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya

Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Saparin, Sumber, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Siswanto Redjo, 1988, *Manajemen Tenaga Kerja*, Bandung : Sinar Baru.

Sugiyono, 2009, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfa Beta

### Sumber Lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

### Web Site :

[http://id.wikipedia.org/wiki/Ferdinand\\_T%C3%B6nnies](http://id.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies)

[http://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile\\_Durkheim](http://id.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Charles\\_Cooley](http://id.wikipedia.org/wiki/Charles_Cooley)